

**EFEKTIVITAS KEBERADAAN PROFESIONALISME KEPALA
LINGKUNGAN DI KECAMATAN MATARAM KOTA MATARAM
(Studi Kasus di Lingkungan Pagesangan Indah Kelurahan Pagesangan
Kecamatan Mataram Kota Mataram)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)



Oleh:

RAMLAH

216110068

**PROGRAM SARJANA ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**EFEKTIVITAS KEBERADAAN PROFESIONALISME KEPALA
LINGKUNGAN DI KECAMATAN MATARAM KOTA MATARAM
(Studi Kasus di Lingkungan PAGESANGAN Indah Kelurahan PAGESANGAN
Kecamatan Mataram Kota Mataram)**

Oleh :

RAMLAH
NIM. 216110068

Untuk memenuhi ujian akhir skripsi

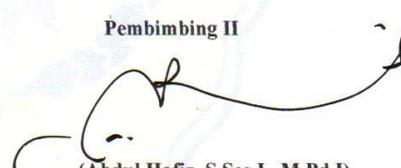
Pada Tanggal, 29 Juli 2021

Menyetujui
Pembimbing

Pembimbing I


(Dr. H. Muhammad Ali, M.Si)
NIDN. 0806066801

Pembimbing II


(Abdul Hafiz, S.Sos.I., M.Pd.I)
NIDN. 0810097105

Mengetahui
Ketua Program Ilmu Administrasi Publik


(Rahmad Hidayat, S.AP. M.AP)
NIDN. 0822048901

LEMBAR PANGESAHAN SKRIPSI

EFEKTIVITAS KEBERADAAN PROFESIONALISME KEPALA LINGKUNGAN DI KECAMATAN MATARAM KOTA MATARAM (Studi Kasus di Lingkungan Pagesangan Indah Kelurahan Pagesangan Kecamatan Mataram Kota Mataram)

Oleh :

RAMLAH
NIM. 216110068

Telah dipertahankan didepan penguji
Pada tanggal 13 Agustus 2021
Dinyatakan telah memenuhi persyaratan

Tim penguji

1. **Dr. H. Muhammad Ali, M.Si**
NIDN. 0806066801

Ketua

2. **Abdul Hafiz, Sos., M.Pd.I**
NIDN. 0810097105

Anggota

3. **Rahmad Hidayat, S.AP. M.AP**
NIDN. 0822048901

Anggota

Ketua Program Administrasi Publik

Rahmad Hidayat, S.AP.M.AP
NIDN. 0822048901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram menyatakan bahwa:

Nama : RAMLAH

NIM : 216110068

Alamat : Kuranji, kec. Labu Api

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik baik di UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM maupun di perguruan tinggi lainnya, dan tidak terdapat unsur-unsur plagiatisme, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70)



RAMLAH
NIM. 216110068



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAMLAH
NIM : 216110068
Tempat/Tgl Lahir : DOMPI, 01-07-1998
Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK
Fakultas : FISIPOL
No. Hp/Email : 082339182763
Judul Penelitian : -

EFEKTIVITAS KEBERADAAN PROFESIONALISME KEPALA
LINGKUNGAN DI KECAMATAN MATARAM KOTA MATARAM
(STUDI KASUS DI LINGKUNGAN PAGESANGAN INDAH KELURAHAN
PAGESANGAN KECAMATAN MATARAM KOTA MATARAM)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 47%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 08 - 09 - 2021

Penulis



RAMLAH
NIM. 216110068

Mengetahui,
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Teip. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAMLAH
NIM : 216110068
Tempat/Tgl Lahir : DOMPU, 01-07-1998
Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK
Fakultas : FISIPOL
No. Hp/Email : 082 339 182 263 / r86397795@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

EFEKTIVITAS KEBERADAAN PROFESIONALISME KEPALA LINGKUNGAN
DI KECAMATAN MATARAM KOTAMATARAM (STUDI KASUS DI LINGKUNGAN
PAESANGAN INDAH KELURAHAN PAESANGAN KECAMATAN MATARAM KOTAMATARAM)

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 08-09-2021

Penulis



RAMLAH
NIM. 216110068

Mengetahui,
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S. Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

“Dengan ilmu kita menuju kemuliaan” (Ki Hadjar Dewantara)

“Berani bermimpi, tapi yang lebih penting, berani melakukan tindakan di balik impianmu.” (Josh Hinds)

“Hidup dan mati ada dalam genggaman ilahi. Takdir adalah kepastian, tapi hidup harus tetap berjalan: Proses kehidupan adalah hakikat, sementara hasil akhir hanyalah syariat. Gusti allah akan menilai ketulusan perjuangan manusia, bukan hasil akhirnya. Kalaupun harus menjumpai kematian, itu artinya mati syahid di jalan tuhan.” (pangeran di penerogo)





Karya Ilmiah Ini Kupesembahkan
Kepada Ayahanda dan Ibunda Tercinta
(A.KARIM & RUSNAH)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat yang dilimpahkan-Nya sehingga pada akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Efektivitas Keberadaan Profesionalisme Kepala Lingkungan Di Kecamatan Mataram Kota Mataram (Studi Kasus di Lingkungan Pagesangan Indah Kelurahan Pagesangan Kecamatan Mataram Kota Mataram)”**. Penulis membuat skripsi ini untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Administrasi Publik (S.AP).

Sangat disadari bahwa dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki penulis, walaupun telah dikerahkan segala kemampuan untuk lebih teliti, tetapi masih dirasakan banyak kekurangan tepatnya, oleh karena itu penulis mengharapkan saran yang membangun agar tulisan ini bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak mungkin akan terwujud apabila tidak ada bantuan dari berbagai pihak, melalui kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan ucapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si. Sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram Bapak Dedy Iswanto, S.T., MM dan Wakil Dekan 2 Amin Saleh, S.Sos, M.Si.
3. Bapak Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fisipol Universitas Muhammadiyah Mataram.

4. Bapak M. Taufik Rachmam Selaku Skretaris Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si. selaku Dosen Pembimbing I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
6. Bapak Abdul Hafiz, S.Sos.I., M.Pd.I selaku Dosen pembimbing II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
7. Yang Penulis cintai dan hormati, yakni kepada kedua orang tua (bapak dan ibu) yang sudah bersusah payah mendukung saya dan selalu memberikan motivasi tiada hentinya.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Mataram, 13 Agustus 2021

Penulis

RAMLAH
NIM. 216110068

**EFEKTIVITAS KEBERADAAN PROFESIONALISME KEPALA
LINGKUNGAN DI KECAMATAN MATARAM KOTA MATARAM
(Studi Kasus di Lingkungan PAGESANGAN INDAH KELURAHAN PAGESANGAN
Kecamatan Mataram Kota Mataram)**

**Ramlah,¹Dr. H. Muhammad Ali, M.Si²Abdul Hafiz, S.Sos.I., M.Pd.I³
Mahasiswa¹, Pembimbing Utama², Pembimbing Pendamping³
Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas keberadaan profesionalisme kepala lingkungan di kecamatan mataram kota mataram (studi kasus di lingkungan pagesangan indah kelurahan pagesangan kecamatan mataram kota mataram). Kepala lingkungan (Kepling) adalah nama lain dari Rukun Warga (RW) merupakan lembaga kemasyarakatan dan mitra pemerintah kelurahan yang memiliki peran dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan yang berdasarkan swadaya, kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Metode penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan tehnik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi analisis data pada penelitian ini yaitu data reduction data dan data display.

Hasil penelitian dengan menunjukkan Efektivitas Keberadaan Profesionalisme Kepala Llingkungan di Kecamatan Mataram Kota Mataram (Studi Kasus di Lingkungan Pagesangan Indah Kelurahan Pagesangan Kecamatan Mataram Kota Mataram). Tugas kepala lingkungan (Kepling) adalah sebagai perpanjangan tangan Lurah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik itu membantu masyarakat untuk pengurusan administrasi di kelurahan maupun terhadap permasalahan lainnya. Di samping itu juga kepala lingkungan mempunyai tugas lainnya yaitu menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan dengan melakukan kerjasama sekolah dengan masyarakat dan babin kamtibmas dengan kegiatan siskamling (a) kemudahan memperoleh informasi, (b) partisipasi, dan (c) menciptakan keamanan di lingkunagn pagesangan indah. Sedangkan faktor-faktor yang belum profesionalnya Kepala Lingkungan, anatra lain: (a) tingkat pendidikan, (b) kepemimpinan, dan (c)pemahaman terhadap tugas dan fungsi.

Kata kunci: Efektivitas, Profesionalisme Kepala Lingkungan

**THE EFFECTIVENESS OF THE HEAD OF NEIGHBORHOOD
PROFESSIONALISM IN MATARAM,
MATARAM CITY**

(Case Study in Pagesangan Indah, Pagesangan Village, Mataram City)

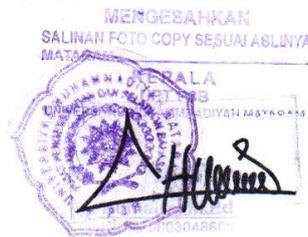
Ramlah,¹ Dr. H. Muhammad Ali, M.Si,² Abdul Hafiz, S.Sos.I., M.Pd.³
Student¹, Principal Advisor², Companion Supervisor³
Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences,
Muhammadiyah University of Mataram

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the efficiency of the environmental head's professionalism in Mataram, Mataram City (a case study in the Pagesangan Indah neighborhood, Pagesangan Village, Mataram District, Mataram City). The Rukun Warga (RW), a community institution and village government partner, is another name for the head of the neighborhood. The RW's role is to maintain and preserve the values of community life based on self-reliance, mutual cooperation, and kinship in order to improve welfare, peace, and regularity in social life. This study is a kind of qualitative-descriptive approach, with data collection techniques through observation, interviews and documentation of data analysis, namely data reduction and data display.

The study's findings revealed the effectiveness of the neighborhood chief's professionalism in Mataram District, Mataram City (Case Study in the Pagesangan Indah Environment, Pagesangan Village, Mataram District, Mataram City). The head of the neighborhood serves as an extension of the Lurah in providing services to the community, assisting the community with both administrative and other problems in the village. In addition, the head of the neighborhood has other responsibilities, such as ensuring environmental security and order through working with the school, the community, and the Babin Kamtibmas on Siskamling activities include: (a) the ease with which information may be obtained, (b) involvement, and (c) the creation of security in the attractive surroundings. While the following are the elements which show the unprofessionalism of Head of Neighborhood: (a) level of education, (b) leadership, and (c) comprehension of duties and roles.

Keywords: *Effectiveness, Neighborhood Head Professionalism*



DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
SURAT PERNYATAAN PLAGIARISME	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACK	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan masalah.....	5
1.3.Tujuan dan manfaat penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1.Penelitian Terdahulu	7
2.2.Landasan Teori.....	8
2.2.1. Pengertian Efektivitas	8
2.2.2. Teori kebijakan Publik	12
2.3.Perencanaan Kebijakan Publik.....	15

2.3.1. Isu kebijakan Publik.....	15
2.3.2. Agenda kebijakan.....	16
2.4.Perumusan Kebijakan Publik.....	16
2.5.Implementasi Kebijakan Publik.....	18
2.5.1. Konsep implementasi kebijakan.....	20
2.6.Evaluasi kebijakan publik.....	21
2.7.Profesionalisme.....	23
2.8.Kepala Lingkungan.....	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
3.1.Jenis Penelitian.....	25
3.2.Waktu dan Lokasi Penelitian.....	25
3.3.Penentuan informan.....	26
3.4.Jenis dan Sumber Data.....	26
3.4.1. Data Primer.....	26
3.4.2. Data Sekunder.....	27
3.5.Tehnik dan Alat Pengumpulan Data.....	27
3.5.1. Pengamatan.....	27
3.5.2. Wawancara.....	28
3.5.3. Dokumentasi.....	29
3.6.Teknik Analisis Data.....	29
3.7.Keabsahan Data.....	31
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1.Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	33
4.1.1. Profil Kelurahan Pagesangan.....	33
4.1.2. Visi dan Misi.....	35
4.1.3. Struktur Organisasi Kelurahan Pagesangan.....	36
4.2.Hasil Penelitian.....	37
4.2.1. Efektivitas Keberadaan Profesionalisme Kepala Lingkungan di Kecamatan Mataram Kota Mataram (Studi Kasus di Lingkungan	

Pagesangan Indah Kelurahan Pagesangan Kecamatan Mataram Kota Mataram)	37
4.2.2. Faktor-faktor Penyebab Belum Profesionalismenya Kepala Lingkungan di Kecamatan Mataram Kota Mataram (Studi Kasus di Lingkungan Pagesangan Indah Kelurahan Pagesangan Kecamatan Mataram Kota Mataram)	44
4.3.Pembahasan.....	48
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	56
5.1.Kesimpulan	56
5.2.Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN-LAMPIRAN	61



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam melakukan kewajiban kerja, setiap individu di tuntut untuk bertindak secara ahli. Profesionalisme yang di poles adalah perpaduan antara kemampuan karakter yang menunjukkan kewajiban tanggung jawab moral. Selain itu, terkait dengan profesi di bidang administrasi publik, profesionalisme yang dapat di tunjukkan harus dipertahankan untuk mencapai pemenuhan masyarakat sebagai pengguna administrasi. Inti dari bantuan publik adalah pengaturan dukungan luar biasa dari daerah yang merupakan contoh dari komitmen aparatur pemerintah sebagai pekerja masyarakat.

Kecamatan sebagai perangkat merupakan komponen lini wilayah dalam memberikan jenis bantuan kepada masyarakat, mengingat pemerintah daerah merupakan derajat pemerintahan yang mempunyai tugas penting dalam penyelenggaraan untuk masyarakat setempat. Untuk situasi ini sub-daerah dituntut untuk memiliki pilihan untuk menunjukkan realitasnya sebagai pemimpin bantuan pelayanan publik. Sebagai penyesuaian situasi kecamatan dari wilayah otoritatif ke ruang berfungsi perangkat teritorial, tugas utama dan elemen camat sebagai puncak organisasi kecamatan juga telah berubah dari puncak kabupaten, yang memiliki kekuatan sebagai penguasa tunggal di bidang pemerintahan untuk berubah menjadi alat provinsi yang dipercayakan untuk menawarkan jenis bantuan kepada masyarakat setempat diruang kerja

tertentu. Sesusai saduwasistiono (dalam widodo, 2005 :190), bahwa sebagai komponen lini wilayah, camat menyelesaikan kewajiban pokoknya sebagai komponen lini khususnya berbuat bertindak. Hal ini mengandung arti bahwa skcamatan dimanfaatkan sebagai tempat penolong bagi daerah fungsional dengan batas wilayah sebagai batas pelayanan administrasi.

Kelurahan adalah himpunan mekanik teritorial kabupaten/kota yang berkedudukan di kelurahan dalam hal ini kelurahan merupakan sub himpunan dari kecamatan atau pada akhirnya kecamatan tersebut terdiri dari beberapa kelurahan. Dalam pelaksanaannya, kelurahan dapat membentuk pembentukan daerah setempat yang mempunyai tugas membantu kepala kota dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, perbaikan, sosial, dan pemberdayaan daerah. Pembentukan kelompok masyarakat sebagaimana disinggung dilakukan atas dorongan daerah setempat melalui musyawarah dan kesepakatan.

Efektivitas adalah komponen prinsip aktivitas otoritatif dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Jika di lihat dari bagian pencapaian dalam mencapai tujuan kecukupan berpusat pada tingkat otoritatif. Selain itu dilihat dari aspek kepraktisan, efektivitas adalah pencapaian berbagai fokus yang telah ditentukan sebelumnya pada jadwal dengan memanfaatkan aset tertentu yang telah ditetapkan untuk menyelesaikan berbagai kegiatan.

Kepala lingkungan yang lebih dikenal dengan sebutan Pala adalah nama lain dari Rukun Warga (RW) merupakan lembaga kemasyarakatan dan

mitra Pemerintah Kelurahan yang memiliki peran dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan yang berdasarkan swadaya, kegotoroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Secara operasional Kepala Lingkungan adalah perpanjangan tangan dari aparat kelurahan, Kepala Lingkungan dan Ketua Rukun Tetangga serta pemberian biaya operasional, yang menyebutkan bahwa Kepala Lingkungan dan Ketua Rukun Tetangga adalah unsur pembantu pelaksana tugas pemerintah kelurahan dengan wilayah kerja tertentu yang pelaksanaan tugasnya di bawah koordinasi lurah.

Dalam perkembangan, seiring dengan perkembangan zaman, organisasi-organisasi lingkungan berperan sangat penting sebagai kerja pemerintah daerah mataram dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) terutama dalam menjaga kualitas dan standar kemanfaatan yang kokoh di kancah publik yang terus dinamis dan menjadi komponen yang signifikan dalam penyebrangan implementasi program pemerintah daerah yang berbeda ke masyarakat. Pemerintah kota mataram memiliki ikrar untuk terus membina batasan kelembagaan lingkungan, salah satunya dengan fokus melalui alokasi dana dalam APBD yang rencananya akan memberikan biaya fungsional kepala lingkungan.

Salah satu tujuan dari pengalokasian dana dalam APBD yang diperuntukkan bagi Kepala Lingkungan bertujuan untuk menciptakan perubahan demi meningkatkan kualitas dan sumber daya manusia khususnya

sumber daya manusia yang ada di kelembagaan lingkungan. Perubahan yang bertujuan untuk mempercepat laju pembangunan menuntut setiap sumber daya manusia atau aparatur yang berkualitas. Dengan adanya kebijakan otonomi daerah, aparatur pemerintah beserta lembaga kemasyarakatan seperti lingkungan merupakan aspek yang sangat penting di dalam peningkatan kualitas kinerja pemerintahan di daerah atau wilayah.

Pembenahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada fungsi pelayanan masyarakat, hendaknya dititik beratkan pada kelembagaan kemasyarakatan Lingkungan. Lembaga kemasyarakatan Lingkungan merupakan ujung tombak pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Sangat disayangkan realita yang muncul di tengah masyarakat, ada banyak kasus dan keluhan masyarakat yang menunjukkan bahwa Kepala Lingkungan belum mampu menjalankan tugas dan kewenangan yang dimilikinya.

Menurut Bintarto (1983), kota sebagai organisasi keberadaan manusia di gambarkan dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan digambarkan oleh lapisan sosial ekonomi yang heterogen dan komponen materialistis. Masyarakat kota terdiri dari penduduk pendatang dan daerah. Masyarakat adalah suatu masyarakat yang heterogen, baik dalam hal pekerjaan, agama, adat maupun budaya.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah efektivitas keberadaan Profesionalisme Kepala Lingkungan di Kecamatan Mataram Kota Mataram (Studi Kasus di Lingkungan Pagesangan Indah Kelurahan Pagesangan Kecamatan Mataram Kota Mataram)?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan belum Profesionalnya Kepala Lingkungan di Kecamatan Mataram kota Mataram (Studi Kasus di Lingkungan Pagesangan Indah Kelurahan Pagesangan Kecamatan Mataram Kota Mataram) ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Melihat dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui efektivitas keberadaan Kepala Lingkungan Kecamatan Mataram Kota Mataram. (Studi Kasus di Lingkungan Pagesangan Indah Kelurahan Pagesangan Kecamatan Mataram Kota Mataram)?
2. Untuk mengetahui penyebab belum profesionalismenya Kepala Lingkungan Kecamatan Mataram Kota Mataram. (Studi Kasus di Lingkungan Pagesangan Indah Kelurahan Pagesangan Kecamatan Mataram Kota Mataram)?

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini terdiri dari dua, yakni sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi untuk menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan administrasi publik yang berkaitan dengan efektifitas keberadaan Profesionalisme Kepala Lingkungan Kecamatan Mataram Kota mataram.

2. Manfaat praktis

1) Manfaat penelitian bagi peneliti

Hasil penelitian ini sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) Administrasi Publik di Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

2) Manfaat penelitian bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru kepada masyarakat tentang efektifitas keberadaan konsep kepala lingkungan.

3) Manfaat penelitian bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kerangka acuan atau bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian, tentunya tidak dapat dipisahkan dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh para ilmuwan dan diharapkan dapat membentengi penelitian yang dilakukan peneliti, begitu pula dengan membandingkan dengan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut adalah beberapa ringkasan penelitian dari penelitian sebelumnya yang dipimpin oleh spesialis sebagai acuan dalam mengarahkan pemnelitian ini :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	Penelitian Terdahulu	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1.	Samuel S. A. Parera (2017) Profesionalisme Kepala Lingkungan Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung	Hasil penelitian bahwa tidak adanya inovasi, dan kurangnya kreatif kepala lingkungan itu sendiri dalam memenuhi tugas dan fungsinya, meskipun dengan berbagai keterbatasan kepala lingkungan kecamatan lembeh selatan memiliki respon yang cukup	<ul style="list-style-type: none">• Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu ialah terletak pada metode penelitian dan jenis penelitiannya bersifat deskriptif kualitatif• Perbedaan penelitian sekarang dengan peneltian terdahulu ialah terletak pada judul penelitian dan lokasi

		baik dalam menanggapi dan melayani kebutuhan masyarakat	
2.	Jenly Victorandi Putra Momuat, Jonhny lumolos, Ismail Sumampow(2018), Kinerja Kepala Lingkungan Dalam Mendukung Program Manado Cerdas	Hasil penelitian inisiatif kepala lingkungan yang diperintahkan oleh lurah sudah memiliki tanggung jawab atau mencintai pekerjaan yang diberikan sehingga kinerja yang dijalankan dapat terlaksana dengan baik.	<ul style="list-style-type: none"> • Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu ialah terletak pada metode penelitian dan jenis penelitiannya bersifat deskriptif. • Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu ialah terletak pada judul penelitian dan lokasi

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas memiliki arti efektif dan pas. Efektivitas adalah kata fundamental, sedangkan deskripsi sifat efektif adalah efektivitas. Efektivitas secara teratur terhubung dengan pencapaian sesuatu yang harus dicapai. Mengenai pelaksanaan target yang mendasari pencapaian terakhir yang diperoleh sesuai dengan ketepatan dalam pelaksanaannya dan mediasi anggota pelaksana (E.Mulyasa, 2007:82).

Effendy (1989 :14) mendefinisikan efektivitas sebagai berikut :
“komunikasi korespondensi mencapai tujuan yang di atur sesuai dengan biaya yang direncanakan, waktu yang telah ditentukan dan jumlah yang tidak

ditentukan (Effendy, 1989 : 14), yang merupakan hubungan antara hasil dan tujuan, semakin penting (sumbangan) hasil untuk pencapaian tujuan, semakin layak efektif organisasi, program atau tindakan. Efektivitas berpusat di sekitar hasil program, atau kegiatan yang di anggap berhasil jika hasil yang dibuat dapat memenuhi tujuan normal atau *spending wisely*.

Efektivitas mengacu pada sumber informasi atau masukan (input), siklus dan hasil yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga penekanan pada hasil akan mempengaruhi semua yang dilakukan, jika dapat mencapai tujuan.

Seperti dijelaskan di atas, efektivitas menggambarkan seluruh siklus dan sumber data, proses dan hasil suatu organisasi mencapai tujuan dari suatu organisasi mencapai targetnya (Effendy, 1989 : 14).

Evektivitas mengacu pada sumber informasi (input), siklus dan hasil (output) yang diselesaikan oleh suatu asosiasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga penekanan pada hasil akan mempengaruhi semua yang dilakukan, jika dapat mencapai tujuan.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas maka efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil dari pada suatu organisasi mencapai tujuannya, dan mencapai targetnya.

Tingkat pencapaian tujuan aparatur dalam suatu organnisasi dikatakan efektif apabila pencapaian tersebut memiliki indikator yang memberikan hasil yang bermanfaat apabila memenuhi standar pemberian pelayanan prima

kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat dalam memberikan pelayanan harus memenuhi asas pelayanan yang telah ditetapkan pemerintah dalam (keputusan MENPAN nomor 63 tahun 2004) yaitu :

a. Transparansi

Adalah bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti, seperti penyediaan sarana dan prasarana unntuk mengakses informasi tanpa berusaha untuk menutup-nutupi kekurangan dari instansi tersebut, penyediaan papan informasi dan media sebagai alat untuk penyampaian informasi kepada masyarakat atau yangn membutuhkan pelayanan dari instansi tersebut.

b. Akuntabilitas

Dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberi pelayanan kepada masyarakat harus memberikan pelayanan yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, tidak mengada-ada dalam pemberian, sehingga ada kepastian yang diterima oleh masyarakat dalam menerima pelayanan. Sehingga apabila suatu hari ada yang menanyakan atau meminta pertanggungjawaban

terhadap kinerja, bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan bukti-bukti yang ada.

c. Kondisional

Adalah sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap terpegang pada prinsip Efisien dan Efektivitas. Pemberi pelayanan tentunya harus menguasai medan dan keinginan penerima pelayanan dan harus berpendidikan sesuai dengan bidang yang dikerjakan agar tidak terjadi kesalahan dalam pemberian pelayanan sehingga pelayanan bisa berjalan lancar dan tepat waktu.

d. Partisipatif

Adalah mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan politik perlu memperhatikan dan menerapkan, prinsip, standar, pola penyelenggara, tingkat kepuasan masyarakat, serta evaluasi kinerja secara keseluruhan. Pemberi pelayanan harus menyediakan juga kotak saran untuk pengunjung agar bisa berpartisipasi untuk memberikan saran atau pendapat mengenai tata cara pelayanan ataupun saran dan prasarana dalam pemberian pelayanan, kegiatan ini tentunya akan membawa dampak baik untuk kedepannya sehingga apapun yang menjadi kekurangan informasi bisa diperbaiki karena adanya partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik.

2.2.2. Teori kebijakan publik

Menurut James A. Anderson (Solichin, 2014: 2) kebijakan adalah sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu, pemahaman ini terkait dengan Carl Friedrich (Budi, 2013: 16) yang menyatakan bahwa kebijaksanaan sebagai suatu arah tindakan yang di usulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan lingkungannya.

Dengan adanya negara-negara yang menganut sistem demokrasi, interaksi otoritas pemerintah dapat dibagi menjadi dua tahap : tahap pertama perincian strategi. Tahap kedua selanjutnya adalah pelaksanaan pengaturan yang telah ditetapkan pada tahap pertama. Pada skala penuh, inklusi rakyat, terlepas dari apakah sebagai aspirasi, keinginan, permintaan, dan lain-lain, memiliki tempat yang luas terutama di tahap pertama. Ini menunjukkan sebagai pemilihan yang umum. Di negara-negara yang adil, pemilihan diadakan sebentar-sebentar. Secara berkala, misalnya di Indonesia untuk partai yang berhasil mengambil keputusan politik, apa yang mereka perjuangkan akan disebut sebagai program yang dijalankan oleh kabinet mereka. Tujuan mereka secara efektif di suarakan untuk melayani kepentingan rakyat.

Berdasarkan jangkauan administrasi, penyertaan kegiatan pemerintah dapat di pesan ke dalam skala yang berbeda. Publik, dalam hal mencakup

seluruh kawasan negara. Teritorial, dalam hal meliputi wilayah kabupaten, kecamatan atau desa.

Berkenan dengan makna kebijakan publik, memang harus diakui bahwa itu benar-benar menantang. Memang beberapa ahli implementasi kebijakan suka mencoba untuk tidak membicarakan definisi. Semua dianggap sama, mereka lebih fokus pada esensi yang terkandung dalam gagasan kebijakan publik.

Thomas R, Dye merumuskan kebijakan publik sebagai: “pilihan pemerintah untuk bertindak atau tidak bertindak”. Dalam bukunya yang berjudul “*The Political System*”, David Easton (dalam Budi winarno, 2011: 57) mendefinisikan kebijakan publik sebagai: “pengalokasian nilai-nilai kepada seluruh masyarakat secara keseluruhan”.

Sebenarnya, definisi Easton ini mensyaratkan sifat otoritatif dalam proses alokasi. Tetapi di dalam kenyataannya, hanya pemerintah yang dapat bertindak secara otoritatif kepada seluruh masyarakat: apapun yang dipilih oleh pemerintah, baik bertindak maupun tidak bertindak.

Sedangkan Harold D. Laswell dan Abraham Kapla menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kebijakan (*policy*) adalah: “proyek, nilai, dan praktik. Mirip dengan pendapat Laswell dan Kaplan Carl Friedrich mengingatkan pentingnya konsep kebijakan memiliki saran, tujuan, dan obyek tertentu yang jelas.

Ada dua hal menarik yang diperoleh dari pendapat Laswell, Kaplan, dan Carl Friedrich, yakni sikap aktif dan pasif. Kedua sikap ini harus

dianggap sebagai pencerminan konsep kebijakan yang jelas. Dalam hal ini sikap pertam, maka pemerintah memang telah melakukan sesuatu tindakan; misalnya larangan mengenai penertiban buku-buku yang berpaham *Marsis*. Di sini, sasaran, tujuan, dan obyeknya secara spesifik harus jelas. Sedangkan dalam sikap pasif, ditunjukkan oleh tiadanya tindakan pemerintah terhadap sesuatu masalah soial; dalam hal inipun, sasaran, tujuan, dan obyeknya secara spesifik harus jelas.

Tidak adanya kejelasan dalam kebijakn publik strategi- strategi terbuka hanya akan membuat sebagian besar orang mengambil asumsi, mereka harus mengakui bahwa keputusan pemerintah adalah untuk melakukan atau tidak bertindak. Sepanjang garis ini, mentalitas yang masuk akal harus dikembangkan. Artinya kita harus fokus pada kekuatan pemerintahan.

Pengaturan publik yang dilakukan akan mencakup hampir semua ruang, kehidupan manusia, muncul dalam menyelesaikan konflik, memberikan tanda penghargaan kepada anggota masyarakat setempat, mengumpulkan pajak, mengatur hubungan, membuang jembatan timbang dll.

Thomas R. Dye (1972) mengatakan bahwa kebijakan publik mempunyai empat sifat, regulatif, organisasional, distributif, dan ekstratif. Dengan demikian, liputan kebijakan publik memang begitu luas. Kebijakan publik berkenan pula dengan urusan pokok bagi negara, seperti pertahanan, keamanan, pendidikan, penyediaan bahan pangan, pengembangan sistem

politik, pembangunan kota dan daerah. Kebijakan publik, pada umumnya melihat lima hal berikut (1972):

1. Distribusi materi-materi di kandung dalam kebijakan publik.
2. Penilaian dampak kekuatan, lingkungan terhadap isi kebijakan publik.
3. Analisis efek pengaturan indtitusional yang terjadi dalam proses politik terhadap kebijakan publik.
4. Konsekuensi-konsekuensi kebijakan publik terhadap sistem politik.
5. Evaluasi dampak kebijakan publik pada masyarakat, baik yang diharapkan maupun yang tidak.

2.3. Perencanaan Kebijakan Publik

2.3.1. Isu Kebijakan Publik

Biasanya suatu masalah sebelum masuk ke dalam kebijakan masalah tersebut menjadi isu terlebih dahulu. Isu, dalam hal ini isu dalam kebijakan, tidak hanya mengandung ketidaksepakatan mengenai arah tindakan aktual dan potensial, tetapi juga mencerminkan pertentangan pandangan mengenai sifat masalah itu sendiri. Dengan demikian, isu kebijakan merupakan hasil dari perdebatan tentang definisi eksplanasi dan evaluasi masalah. Oleh karena itu, munculnya suatu masalah misalnya, apakah pemerintah harus membuat peraturan tentang standar kualitas udara di kawasan industri di negara-negara maju pada dasarnya akibat adanya konflik asumsi mengenai sifat-sifat polusi.

Isu ini akan menjadi embrio awal bagi munculnya masalah-masalah publik dan bila masalah tersebut mendapat perhatian yang memadai, maka ia akan masuk ke dalam agenda kebijakan. namun demikian, karena pada

dasarnya masalah-masalah kebijakan mencakup dimensi yang luas maka suatu isu tidak secara otomatis bisa masuk ke agenda kebijakan isu-isu yang beredar dalam masyarakat akan bersaing satu dengan yang lain untuk mendapatkan perhatian dari para elit politik sehingga isu yang mereka perjuangkan dapat masuk ke agenda kebijakan, seperti misalnya memobilisasi diri, mencari dukungan kelompok-kelompok lain, maupun menggunakan media massa.

2.3.2. Agenda Kebijakan

Rencana strategi didefinisikan sebagai permintaan yang dipilih atau tuntutan-tuntutan oleh pembuat pengaturan untuk melakukan tindakan tertentu. Oleh karena itu, rencana strategi dapat dibedakan dari permintaan politik secara keseluruhan dan dengan ungkapan “prioritas” yang biasanya diharapkan untuk merujuk pada susunan rencana sesuatu dengan pemikiran bahwa satu rencana adalah prioritas yang lebih tinggi daripada yang lain.

2.4. Perumusan Kebijakan Publik

Rencana perumusan kebijakan publik (*policy formulation*) merupakan salah satu tahapan penting dalam penyusunan kebijakan publik. Seperti yang disusun oleh Charles Lindblom dan beberapa ahli lainnya, dalam memahami perumusan kebijakan kita perlu memahami aktor yang dimaksud atau pemeran yang terlibat dalam proses pembentukan pengembangan strategi, baik aktor resmi maupun tidak resmi. Seperti yang diungkapkan oleh Charles Lindblom bahwa untuk memahami siapa yang sebenarnya merumuskan kebijakan, seseorang harus terlebih dahulu memahami gagasan tentang banyaknya pemeran serta

(*participation*), bagian atau pekerjaan apa yang mereka mainkan, posisi atau jenis kekuatan yang mereka miliki, dan bagaimana mereka saling terkait dan saling mengamati. (Charles Lindblom, 1984: *Proses penetapan kebijakan publik*. Edisi kedua. Penerjemah: Ardian Syamsudin, Jakarta: Airlangga, hal. 3)

Menurut Charles Lindblom, setiap anggota memainkan peran tertentu yang meliputi : warga biasa, pemimpin, anggota DPR, pemimpin kelembagaan, anggota perlemen, aktivis partai, pemimpin partai, hakim, pegawai pemerintah, spesialis khusus, dan manajer usaha bisnis.

Sementara itu, definisi kebijakan adalah proses interaksi yang rumit. Beberapa strategi untuk mempelajarinya telah dibuat oleh para peneliti dengan menaruh minat dalam kebijakan publik. Strategi utama adalah mengisolasi rencana pendekatan perumusan kebijakan kedalam beberapa tahap dan kemudian menganalisis setiap tahap tersebut. Pertama-tama dipelajari bagaimana mendefinisikan isu-isu ini untuk mengambil tindakan, kemudian sikap pada titik itu perspektif apa yang di ambil oleh lembaga legislatif atau lembaga lain, kemudian bagaimana para perintis menjalankan kebijakan, dan terakhir bagaimana kebijakan tersebut dinilai.

Dalam pembahasan di atas bermaksud untuk mengetahui bagaimana metode yang terlibat dalam membentuk dan perumusan kebijakan publik terjadi, siapa yang mengambil bagian peran dalam proses pengembangan strategi dan bagaimana mereka memengaruhi pembentukan kebijakan tersebut.

Sementara itu, dalam pembicaraan mengenai para aktor yang terkait dengan perumusan kebijakan ini, dilakukan dengan alasan bahwa seperti yang

diungkapkan oleh Rushefky, “mengenali siapa yang mencirikan masalah dan bagaimana mereka mendefinisikan masalah itu hal penting”. Ini juga menyangkut konsekuensi dari mengkarakterisasi masalah. Definisi masalah yang berbeda akan memiliki berbagai konsekuensi untuk strategi pendefinisian masalah tersebut. Dalam percakapan ini juga bertujuan untuk melihat pelaksanaan strategi dan bagaimana lingkungan mempengaruhi bagi proses penyusunan dan perincian kebijakan.

2.5. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan diharapkan melihat konsistensi dari pendekatan kelompok sasaran kebijakan. Dengan cara ini, menurut sudut pandang perilaku, konsistensi kelompok sasaran merupakan faktor penting yang menentukan pencapaian implementasi kebijakan.

Implementasi kebijakan merupakan tahap krusial dalam ukuran kebijakan publik. Sebuah program penataan harus dilakukan untuk mempengaruhi tujuan yang diinginkan. Keberhasilan pelaksanaan strategi implementasi kebijakan atau program juga dapat dikaji tergantung pada proses pelaksanaan (sudut pandang proses) dan hasil yang dicapai (sudut pandang hasil). Dari sudut pandang proses, suatu program administrasi dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan pengaturan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain tata cara atau teknik pelaksanaan, agen pelaksanaan, pengumpulan sasaran dan manfaat program. Untuk sementara, menurut sudut pandang hasil, program dianggap berhasil ketika program tersebut memiliki efek yang ideal. Sebuah program mungkin berhasil menurut perspektif siklus, namun

mungkin gagal di tinjau sejauh efek berikutnya, atau sebaliknya. Pada akhirnya, pelaksanaan implementasi kebijakan dapat dipandang efektif bila tampaknya dapat diprediksi antara proses yang dilalui dan hasil yang dicapai.

Van Meter dan Van Horn mengembangkan model proses implementasi kebijakan (Agostino, 2006) yang keduanya menegaskan situasi antara penugasan yang dibutuhkan oleh program dan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok penerima dan organisasi, khususnya kesamaan antara kondisi yang dipilih oleh organisasi untuk memperoleh hasil program dan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program.

Dalam hal hasil program tidak sesuai dengan persyaratan kelompok tujuan, jelas output tidak dapat digunakan. Jika organisasi pelaksana program tidak dapat menyelesaikan usaha-usaha yang dibutuhkan oleh program, maka organisasi tersebut tidak dapat seperti yang diharapkan dalam menyampaikan hasil program. Atau lagi, jika kebutuhan yang ditetapkan oleh organisasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi oleh pertemuan tujuan, pertemuan tujuan tidak akan mendapatkan hasil program. Dengan demikian, kesamaan antara ketiga komponen implementasi kebijakan menjadi sangat penting agar program berjalan sesuai dengan pengaturan yang telah dibuat.

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979) menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa : “Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirimuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-

kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat-akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian” (Winarno, 2011: 134).

2.5.1. Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari, proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang, implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana sebagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menajlankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*). Misalnya, implementasi dikonseptualisasikan sebagai suatu prose, atau serangkaian keputusan dan tindakan yang ditujukan agar keputusan-keputusan yang diterima oleh lembaga-lembaga legislatif bisa dijalankan. (Budi Winarmo: 2011:147)

Implementasi juga bisa diartikan dalam konteks keluaran, atau sejauh mana tujuan-tujuan yang telah direncanakan mendapatkan dukungan, seperti tingkat pengeluaran belanja bagi suatu program. Akhirnya, pada tingkat abstraksi yang paling tinggi, dampak implementasi mempunyai makna bahwa telah ada perubahan yang bisa diukur dalam masalah yang luas yang dikaitkan dengan program, undang-undang publik, dan keputusan yudisial.

Misalnya, apakah kemiskinan telah bisa dikurangi atau warganegara lebih aman dalam kehidupan sehari-harinya dibandingkan pada waktu sebelum penetapan program kesejahteraan sosial atau kebijakan pemberantasan kejahatan singkatnya, implementasi sebagai suatu konsep itu bisa dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran, dan suatu dampak. Implementasi juga melibatkan sejumlah aktor, organisasi, dan teknik-teknik pengendalian. (Budi Winarmo:2011:148).

Secara sederhana, model deskriptif manajemen implementasi kebijakan berbasis pengetahuan meliputi: “dimensi” (substansi, signifikansi atau urgensi, konteks, infrastruktur), “indikator” dan “kriteria pengukuran” dari berbagai model implementasi kebijakan sebagai sebuah sistem yang menekankan peranan dan fungsi aktor pelaksana, pemangku kepentingan, dan kelompok target dalam memberdayakan kreasi pengetahuan yang dimiliki dalam melaksanakan kebijakan atau program.

2.6. Evaluasi Kebijakan Publik

Dengan asumsi kebijakan dipandang sebagai contoh kegiatan yang berurutan, penilaian kebijakan adalah tahap terakhir dalam proses kebijakan. Meski demikian, ada beberapa ahli yang mengatakan hal lain bahwa penilaian bukanlah tahap terakhir dari proses kebijakan publik. Pada dasarnya, kebijakan publik dilengkapi dengan alasan tertentu, untuk mencapai tujuan tertentu yang menarik diri dari isu-isu yang telah ditetapkan sebelumnya. Penilaian dilakukan mengingat tidak semua program kebijakan terbuka mencapai hasil yang ideal. Sering terjadi kebijakan lalai untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh

karena itu evaluasi kebijakan ditampilkan untuk melihat apakah kebijakan publik yang dilakukan telah mencapai efek yang ideal. Dalam bahasa yang lebih terbatas evaluasi adalah suatu gerakan yang berarti mensurvei “manfaat” suatu strategi.

Sebagai aturan umum, evaluasi kebijakan dapat di lihat sebagai sebuah kegiatan termasuk penilaian atau penilaian dari suatu kebijakan yang menggabungkan substansi, dampak dan implementasi. Untuk situasi ini penilaian kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang berguna. Ini berarti bahwa penilaian strategi tidak hanya dilakukan pada tahap terakhir, tetapi diselesaikan melalui interaksi proses kebijakan. Akibatnya, penilaian strategi dapat menggabungkan tahap perincian masalah kebijakan, program yang diusulkan untuk menangani masalah kebijakan, pelaksanaan dan tahap dampak kebijakan.

Evaluasi kebijakan publik merupakan bagian atau fase terakhir dari suatu pengaturan publik, oleh karena itu suatu kebijakan publik tidak dapat diremehkan tetapi harus diperiksa, dan salah satu komponen pengamatan tersebut disebut sebagai “evaluasi kebijakan”. Penilaian pendekatan itu sendiri dilakukan untuk mensurvei sejauh mana kelayakan kebijakan publik bertanggung jawab kepada konstitusennya. Selain itu, penilaian diharapkan dapat melihat kesenjangan antara asumsi dan kenyataan serta mencari kekurangan untuk menutupi kekurangan.

Menurut Lester dan Stewart penilaian kebijakan dapat dipisahkan menjadi dua tugas yang berbeda-beda. Tugas utamanya adalah mencari tahu hasil apa yang dimiliki suatu kebijakan dengan menggambarkan dampaknya. Sedangkan usaha

selanjutnya adalah mensurvei keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan yang bergantung pada prinsip atau aturan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.7. Profesionalisme

Istilah profesionalisme itu berlaku untuk semua aparat mulai dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Profesionalisme dapat diartikan sebagai suatu kemampuan dan keterampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkatan masing-masing. Profesionalisme menyangkut kecocokan antara kemampuan yang dimiliki oleh birokrasi dengan kebutuhan tugas, merupakan syarat terbentuknya aparat yang profesionalisme. Artinya keahlian dan kemampuan aparat merefleksikan arah dan tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi (kurniawan, 2005 : 74).

2.8. Kepala Lingkungan

Kepala lingkungan adalah sebagai perluas lurah dalam menawarkan jenis pelayanan kepada masyarakat setempat, baik itu membantu masyarakat untuk administrasi peraturan di kelurahan atau masalah lain. Selain itu, kepala lingkungan memiliki kewajiban yang berbeda-beda khususnya menjaga keamanan dan pengendalian lingkungan dengan berkordinasi dengan kegiatan siskamling.

Tugas kepala lingkungan adalah untuk mengetahui tentang siapa saja masyarakat yang beranjak dari lingkungan mereka saat ini dan siapa individu yang memasuki lingkungan mereka saat ini. “sebenarnya pekerjaan kepala lingkungan tidak mengenal waktu, mereka juga bisa bekerja 24 jam, misalnya pada jam 12 siang ada masalah dengan penghuni dalam keadaan mereka saat ini,

kepala lingkungan harus menengahi. Memperhatikan persoalan-persoalan penduduk di daerah tersebut.

Kepala lingkungan bertanggung jawab untuk menjaga keamanan lingkungan sama seperti menyambut dan mengumpulkan masyarakat dalam menjaga keamanan untuk membuat lingkungan yang menyenangkan dan aman.

Kepala lingkungan bertanggung jawab untuk menjaga kerapian dalam lingkungan serta mengingatkan dan mengajak masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan untuk membangun lingkungan yang bersih. Dorongan atas kepala lingkungan dalam melakukan perintah/pembawaan dari lurah, perintah yang diberikan dari kelurahan atas daerah, ketika dihadapkan pada sesuatu harus membuat langkah yang terbaik dan membuat langkah seperti menyampaikan data kepada pimpinan lebih tepatnya lurah, jika menemukan ketidak sesuaian lingkungan, dia harus di informasikan ke kelurahan dan akan diteruskan lagi ke tingkat pemerintahan publik di atasnya, jadi untuk situasi ini semua dinamika dipegang sepenuhnya oleh kelurahan, kepala lingkungan hanya mencari informasi dan informasi diberikan ke kelurahan untuk di survei kembali.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2013: 4) mendefinisikan penelitian kualitatif untuk prosedur penelitian hal ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari beberapa perilaku orang yang diamati dengan penjelasan secara terperinci tentang permasalahan yang berkaitan dengan teori dan data yang ditemukan, sehingga mendapat suatu kesimpulan.

Bertolak dari rumusan masalah yang telah dikemukakan pada bab pendahuluan serta sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini, metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu yang digunakan dalam Penelitian ini akan dilakukan selama 3 bulan dari bulan Agustus-oktober. Penelitian berlokasi diKecamatan Mataram Kota Mataram, tujuan saya melakukan penelitian di lokasi ini karena menurut saya mudah dalam mencari data dan informasi. Peneliti mengambil lokasi penelitian ini karna profesionalisme Kepala Lingkungan menarik untuk di teliti

dan sejauh mana profesionalisme yang dimiliki oleh Kepala Lingkungan itu sendiri.

3.3 Penentuan Informan/Narasumber

Informan dalam penelitian ini adalah orang yang dianggap paling bisa dan memahami tentang apa yang saya dapatkan dalam hal ini peneliti menggali data dari sumber yang akurat.

➤ Berdasarkan penjelasan di atas Informan dalam penelitian ini adalah :

1. Lurah
2. sekretaris Lurah.
3. Kepala Lingkungan.
4. warga masyarakat.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland (dalam Moleong, 2013: 157) sumber data pertama dalam penelitian kualitatif ini adalah pembahasan-pembahasan dan tindakan, lebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan sebagainya. Berkaitan dengan hal ini beberapa bagian jenis datanya dibagi dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik.

Data-data yang dipergunakan dalam penelitian ini ada 2 yakni :

1. Data Primer

Data yang kita dapatkan langsung di lapangan dari narasumber yang terkait dengan permasalahan yang diketahui. Selain itu, penulis juga melakukan observasi lapangan dan mengumpulkan data dalam bentuk catatan tentang situasi dan kejadian di lapangan.

2. Data Sekunder

Yaitu pelengkap atau penopang data primer yang dikumpulkan sesuai dari data. Data ini dapat berupa dokumen, arsip, majalah dan foto-foto yang dihubungkan dengan keperluan peneliti. Data ini digunakan untuk mendukung informasi dari data primer yang diperoleh baik dari wawancara observasi langsung ke lapangan.

3.5 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dari lapangan, peneliti melakukan beberapa metode pengumpulan data yang lebih tepat dengan jenis penelitian, adapun metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

1. Pengamatan

Ada beberapa alasan mengapa dalam penelitian kualitatif, pengamatan dimanfaatkan sebesar-besarnya seperti yang dikemukakan oleh Guba dan Lincoln (dalam Moleng, 2013: 174) sebagai berikut:

Pertama-tama metode persepsi ini bergantung pada pandanganterang langsung. Kedua, metode persepsi juga memungkinkan anda untuk melihat dan memperhatikan diri anda sendiri, kemudian merekam perilaku dan peristiwa yang terjadi dalam kondisi nyata. Ketiga, perepsi memungkinkan ilmuwan untuk merekam peristiwa-peristiwa dalam keadaan yang di identifikasikan dengan informasi proposional dan informasi yang diperoleh secara langsung dari informasi. Keempat, metode observasional memberdayakan para ilmuwan untuk memahami keadaan yang kompleks. Kelima, dalam situasi tertentu dimana metode korespondensi lainnya tidak

praktis, persepsi dapat menjadi alat yang sangat membantu. Instrumen persepsi dalam eksplorasi ini adalah *recounted record* (daftar sejarah sosial) *intermiten note*, dan benar-benar melihat catatan.

2. Wawancara

Wawancara diskusi dengan alasan tertentu. Diskusi diakhiri dengan dua pertemuan, yaitu (penanya) yang mengajukan pertanyaan dan (yang diwawancara) yang memberikan tanggapan atas pertanyaan tersebut. Alasan memimpin wawancara, sebagaimana ditegaskan oleh Linclon dan Guba (dalam Moleong, 2013:186) antara lain: membangun tentang individu, acara, asosiasi, sentimen, inspirasi, permintaan, keprihatinan, dan lain-lain kebulatan suara: mereproduksi kebulatan seperti pengetahuan tentang masa lalu: memperluas kebulatan yang benar untuk membentuk pengetahuan tentang masa depan: mengkonfirmasi, mengubah, dan mendapatkan data yang di peroleh dari orang lain dan memeriksa, mengubah, dan memperluas pengembangan yang di buat oleh analisis, sebagai pemeriksaan bagian.

Tehnik pertemuan digunakan sebagai sumber informasi penting atau sebagai sumber informasi utama dalam ujian ini. informasi esensial adalah informasi yang diperoleh secara langsung melalui eksplorasi dan pertemuan dengan responden atau aksi. Pertemuan yang digunakan adalah pertemuan yang terorganisir, khususnya menyiapkan daftar pertanyaan sebelumnya, alat pertemuan dalam ujian ini adalah buku, pulpen, dan alat perekam.

3. Dokumentasi

Menurut Guba dan Lincoln (dalam buku Moleong, 2013: 216). Dokumentasi merupakan rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak, dapat berupa catatan anekdot, surat buku harian, surat keputusan, dokumen administrasi, arsip dan dokumen-dokumen lainnya. Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis yang sudah ada sebelumnya. Alat dokumentasi dalam penelitian ini adalah kamera, alat perekam, dan hp.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2012: 246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi data.

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu di catat secara teliti dan rinci. Seperti telah di kemukakan, semakin

lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. reduksi data dapat di bantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

2. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan antar kategori dalam hal ini Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2012: 249) yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks naratif. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di pahami tersebut.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang di kemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak di temukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi

apabila kesimpulan yang di kemukakan pada tahap awal, di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang di kemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan pada penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah di teliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal secara intraktif, hipotesis atau teori.

3.7 Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan yaitu, derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan dan kepastian.

1. Derajat kepercayaan

Pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari nonkualitatif. Derajat kepercayaan ini berfungsi untuk melaksanakan inkuri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

2. Keteralihan

Keteralihan sebagai persoalan empiris bergantung pada kesamaan antara konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan pengalihan tersebut

seorang peneliti hendaknya mencari dan mengumpulkan kejadian empiris tentang kesamaan konteks. Dengan demikian peneliti bertanggungjawab untuk menyediakan data deskriptif secukupnya jika ia ingin membuat keputusan tentang pengalihan tersebut.

3. Kebergantungan

Kebergantungan merupakan substitusi istilah reliabilitas dalam penelitian yang nonkualitatif. Pada cara nonkualitatif, reliabilitas ditunjukkan dengan jalan mengadakan replikasi studi. Jika dua atau beberapa kali diadakan pengulangan suatu studi dalam suatu kondisi yang sama dan hasilnya secara esensial sama, maka dikatakan reliabilitasnya tercapai.

4. Kepastian

Kepastian berasal dari konsep objektivitas menurut nonkualitatif. Nonkualitatif menetapkan objektivitas dari segi kesepakatan antar subjek. Disini pemastian bahwa sesuatu itu objek atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang. Dapat dikatakan bahwa pengalaman seseorang itu subjektif sedangkan jika disepakati oleh beberapa atau banyak orang barulah dapat dikatakan objektif. Jadi objektivitas-subjektivitasnya suatu hal bergantung pada seseorang.